

BAB V

Kesimpulan

Jepang merupakan negara yang terletak di Kawasan Asia Timur dan merupakan salah satu negara kepulauan. Negara yang terkenal dengan Bunga Sakura ini sudah tidak asing lagi di dunia internasional. Negara Jepang menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dalam perekonomiannya setelah adanya perang dunia kedua. Perang membuat beberapa negara lain terkena dampak krisis ekonomi termasuk juga Negara Jepang. Negara Jepang semakin mengalami keterpurukan *pasca* bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki.

Negara ini juga dikenal dengan perekonomian yang maju walaupun dengan keterbatasan sumber daya alam. Walaupun dengan keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara Jepang, namun negara ini dapat membuktikan keberhasilannya dalam hal perekonomian. Sehingga Negara Jepang mampu bersaing dengan negara lain di dunia Internasional dalam sektor perekonomian. Perekonomian di Negara Jepang tentunya tidak lepas dari bidang perindustriannya, yang mana industri di Negara Jepang sangat mendominasi sektor perekonomian di negara tersebut.

Perekonomian Negara Jepang mengalami dinamika yang sangat menarik untuk dicermati di mana Negara Jepang mengalami kegagalan dalam perang dunia kedua yang akhirnya membawa negaranya ke dalam krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu membuat Negara Jepang sangat terpuruk hingga mencapai level yang sangat rendah pada tahun 1945. Namun ketika, diterapkannya perubahan orientasi kebijakan politik luar negeri Negara Jepang diterapkan yaitu yang berupa

Yoshida *Doctrine* dan diarahkan pada rehabilitasi ekonomi, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Negara Jepang sedikit demi sedikit membawa Negara Jepang mengalami perubahan ekonomi yang sangat baik hingga pada tahun 1980-an GDP Negara Jepang menyamai Negara Inggris bahkan melampaui GDPnya pada tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi Negara Jepang ini tentunya tidak lepas dari berbagai bidang termasuk salah satunya adalah bidang industri manufaktur, di mana dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang serius bagi Negara Jepang.

Kemajuan industri manufaktur di Negara Jepang mengalami problematika yang cukup rumit mengingat kasus Minamata menjadi kasus yang cukup fenomenal hingga saat ini di lingkup dalam maupun internasional. Tentunya kasus Tragedi Minamata yang menimpa Negara Jepang ini menjadi simbol bahwa Industri di Negara Jepang kurang peduli akan keseimbangan ekosistem sekitar industrinya dan hanya memikirkan bagaimana terus memproduksi. Dengan banyaknya persoalan yang muncul akibat itu tentunya mengharuskan Negara Jepang mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus tersebut baik dalam negeri maupun luar negerinya. Tragedi Minamata merupakan salah satu contoh tragedi akibat dari adanya ketidakseimbangan ekosistem yang dilakukan oleh para pengusaha yang hanya mementingkan pencarian keuntungan tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

Pemerintah Jepang untuk membuat industrinya tidak mengulangi kasus yang sama lagi seperti Tragedi Minamata tentunya membuahkan hasil yang baik tiap tahunnya. Strategi Pemerintah Jepang untuk memperbaiki citra buruk industri

Jepang di Kawasan Asia Timur *pasca* Tragedi Minamata adalah dengan melalui menjalin kerjasama dengan gerakan chonaikai. Gerakan chonaikai tersebut merupakan gerakan asosiasi lingkungan yang diawasi langsung oleh Pemerintah Jepang. Gerakan tersebut tentunya berawal dari munculnya kesadaran masyarakat di Negara Jepang akan pentingnya menjaga lingkungan, agar kasus pencemaran lingkungan akibat limbah industri tidak terulang kembali dan menimpa Negara Jepang. Kemudian, upaya yang dilakukan sebagai upaya formal Pemerintah Jepang dengan gerakan chonaikai adalah memberlakukan undang-undang *The Basic Act on Establishing a Sound Material-Cycle Society* diumumkan pada Bulan Juni 2000, namun baru beroperasi pada Januari 2001. Dengan adanya UU tersebut diharapkan masyarakat Jepang semakin sadar bagaimana pentingnya menjaga lingkungan agar sumber daya yang tersedia dapat bertahan hingga jangka waktu yang panjang. Strategi selanjutnya yang dilakukan Pemerintah Jepang adalah menerapkan teknologi ramah lingkungan. Industri yang ingin mendirikan usahanya di Negara Jepang harus mengikuti regulasi yang telah dikeluarkan Pemerintah Jepang, bagi perusahaan yang mengikuti regulasi tersebut dengan mudah akan mendapatkan perizinan mendirikan industri di Negara Jepang, namun bagi yang tidak mengikuti regulasi yang telah dibuat, tentunya Pemerintah Jepang sudah menyiapkan *punishment* yaitu sebuah *green tax*.

Dengan adanya penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa kajian Hubungan Internasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian mata kuliah Politik Pemerintahan Jepang. Hal ini dibuktikan dalam bab IV mengenai upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Jepang agar kembali mendapatkan citra

yang positif bagi masyarakat Jepang dan negara lain tentunya. Pengembalian citra positif Negara Jepang yang dilakukan oleh Pemerintahan Jepang tentunya memiliki unsur politik yang akan menguntungkan Negara Jepang. Penelitian mengenai Tragedi Minamata sebagai titik awal strategi kebijakan ekonomi hijau Jepang dapat berlanjut, dan tidak berhenti di sini saja. Akan lebih baik, jika ada penelitian lebih lanjut misalnya mengenai Efek penerapan kebijakn ekonomi hjau yang diterapkan Negara Jepang bagi Kawasan Asia Timur dan sekitarnya. Apakah efek penerapan tersebut dapat diterima dengan baik sehingga semakin memacu hubungan kerjasama dengan negara lain, atau malah sebaliknya.